

**PENEGAKAN KEADILAN SOSIAL
TERHADAP AKSES ILMU PENGETAHUAN
MENUJU MASYARAKAT BERPENGETAHUAN
(KNOWLEDGE SOCIETY)**

***ENFORCEMENT OF SOCIAL JUSTICE TO ACCESS SCIENCE
FOR KNOWLEDGE SOCIETY***

Muhammad Zulhamdani¹, Prakoso Bhairawa Putera²

¹Pusat Pemanfaatan Iptek dan Inovasi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia,
Kawasan CSC-LIPI, Gedung Inovasi Jln. Raya Jakarta-Bogor Km. 47, Cibinong
16912, Indonesia

²Biro Perencanaan dan Keuangan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia,
Gedung SWS Lantai 6, Jln. Jend Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710,
Indonesia

e-mail: zulhamdani.m@gmail.com

Diserahkan: 07/06/2020, Diperbaiki: 18/09/2020, Disetujui: 28/09/2020

DOI: 10.47441/jkp.v15i2.129

Abstrak

Keadilan sosial dalam bidang ilmu pengetahuan adalah kunci untuk mencapai sebuah masyarakat ilmu pengetahuan. Indonesia sebagai negara berkembang juga berusaha untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Namun, tidak semua masyarakat Indonesia mendapatkan akses terhadap pendidikan formal dan sumber pengetahuan lainnya. Perkembangan ilmu pengetahuan mengarahkan suatu bangsa yang mempunyai kemampuan dalam menciptakan dan membentuk peradaban yang maju. Tulisan ini disusun berdasarkan studi pustaka dan data resmi pemerintah terkait akses pendidikan. Keadilan sosial terhadap ilmu pengetahuan akan tercapai dengan terciptanya keseimbangan dalam akses pengetahuan serta ketersediaan sumber-sumber pengetahuan. Tingkat buta huruf yang semakin berkurang menunjukkan bahwa masyarakat telah mendapatkan pendidikan yang memadai. Terdapat lima aspek dalam mencapai kemajuan masyarakat berbasis pengetahuan, yakni infrastruktur, konten, keterjangkauan, keberagaman dan kapasitas manusia.

Kata Kunci: Pembangunan Masyarakat, Akses Pendidikan, Keadilan Sosial, Masyarakat Berpengetahuan

Abstract

Social justice in the field of science is the key to achieving a knowledge society. Indonesia as a developing country is also trying to develop science. However, not all Indonesians have access to formal education and other sources of knowledge. The development of science led a nation that had the ability to create and shape advanced civilizations. This paper is based on a literature study and official government data related to education access. Social justice towards science will be achieved by creating a balance in access to knowledge and the availability of sources of knowledge. The decreasing level of illiteracy indicates that the community has received a proper education. There are five aspects to achieving progress in a knowledge-based society namely infrastructure, content, affordability, diversity, and human capacity.

Keywords: Community Development, Education Access, Social Justice, Knowledge Society



PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran yang telah dinikmati oleh negara-negara maju di Amerika Utara dan Eropa semenjak pertengahan abad ke-20 serta negara-negara baru maju di Asia Timur di penghujung abad ke-20 (Mohamed dkk. 2008), sangat ditentukan oleh keberhasilan negara-negara tersebut dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Bahkan beberapa negara Asia seperti Jepang, Korea dan China telah menjadi contoh negara yang maju karena ilmu pengetahuan (Huggins dan Hiro 2008). Perkembangan ilmu pengetahuan mengarahkan bangsa-bangsa tersebut melahirkan kemampuan dalam menciptakan dan membentuk peradaban yang maju. Perkembangan pengetahuan tersebut telah menyebabkan peningkatan efisiensi dan produktivitas sektor-sektor produktif, yang pada gilirannya meningkatkan posisi strategis dalam perdagangan internasional (Yigitcanlar dan Sarimin 2015). Ilmu pengetahuan pula yang telah memberikan berbagai fasilitas yang terjangkau masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Tidak sulit bagi kita sekarang ini untuk meyakini bahwa ilmu pengetahuan bisa dan harus dijadikan alat untuk tumbuh dan berkembangnya suatu negara bangsa (Sharma dkk. 2008).

Sebuah kemajuan bangsa menuntut pemberdayaan masyarakat ke arah kemajuan pula (Kulikov 2016). Masyarakat merupakan motor penggerak peradaban bangsa dan dari mereka juga lahir sebuah generasi yang akan mengendalikan bangsa ke mana arah tujuannya. Maka dari itu nuansa-nuansa dan tradisi yang mendukung pada terciptanya kualitas masyarakat maju perlu diupayakan. Salah satunya adalah tradisi literasi sebagai budaya keilmuan dan pengembangan seluruh lapisan masyarakat. Literasi sains diyakini sebagai salah satu cara untuk bisa mengatasi berbagai persoalan yang terjadi baik persoalan politik, ekonomi, sosial, budaya dan masalah dekadensi moral dan intelektual, selain penguatan karakter sumber daya manusia itu sendiri (Mukti 2018). Upaya ini tentu dilakukan pada berbagai jenis pendidikan (formal, informal dan non formal) serta pada berbagai jenjang pendidikan (mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan perpendidikan tinggi). Oleh sebab itu, gerakan literasi tidak hanya terbatas pada kalangan akademisi tertentu saja akan tetapi totalitas kelas masyarakat. Langkah membangun gerakan literasi dalam masyarakat mulai dilakukan, seperti gerakan literasi Tanah Ombak (Silaen dkk. 2018) dan gerakan literasi masyarakat di Kabupaten Bandung (Rohman dkk. 2017). Totalitas ini membentuk sebuah masyarakat yang berpengetahuan atau dikenal dengan *knowledge society* (Hearn dkk. 2002).

Gerakan literasi pendidikan tidak dapat dilepaskan dari literasi informasi. Isu ketersediaan sarana teknologi informasi (internet) serta perpustakaan yang tentunya sudah ada di tiap institusi pendidikan (Nurohman 2014) dan keterampilan akses yang diukur berdasarkan kepemilikan perangkat dan frekuensi penggunaan (Limilia dkk. 2019), menjadi dua hal yang memicu problematik dalam gerakan literasi ini. Namun, yang perlu dipahami bahwa tingkat melek informasi menjadi salah satu modal kemajuan suatu negara melalui jalur pendidikan.

Pendidikan adalah kunci untuk menciptakan, menyerap, dan menyebarkan pengetahuan (Ahmed & Ibrahim 2013; Oudheusden dkk. 2015; Alizadeh dkk. 2015). Pendidikan juga merupakan salah satu cara untuk menciptakan masyarakat yang bertumpu pada pengetahuan. Namun permasalahan yang mendasar di dalam bangsa Indonesia adalah akses terhadap pendidikan tidak tersebar secara merata atau yang dikenal dengan disparitas akses pendidikan (Doriza dkk. 2012; Larasati dkk. 2014), dan golongan miskin paling sedikit mendapat bagian (Amalia dkk. 2018), kasus ini dapat ditemukan di Indonesia yang pendidikannya belum merata antara masyarakat miskin dan masyarakat menengah ke atas. Pendidikan di Indonesia yang relatif mahal khususnya pendidikan lanjutan dan mayoritas penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan membuat pendidikan itu tidak merata dikalangan masyarakat miskin. Pemerintah telah melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi ketidakmerataan pendidikan ini dengan cara Wajib Belajar Sembilan Tahun (Yanuarto 2010), pemberian beasiswa-beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu atau miskin, kemudian memberikan Bantuan Dana Operasional (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM), yang kesemua ini adalah langkah

pemerintah dalam memberikan akses pendidikan bagi masyarakat miskin (Amalia dkk. 2018). Bahkan pemerintah daerah pun berusaha untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan sebagai bagian dari strategi percepatan indeks pembangunan manusia (Fitriyanti dkk. 2019).

Ada tiga faktor yang berpengaruh terhadap aksesibilitas dalam memperoleh pendidikan untuk anak-anak di Indonesia (Perdana 2015). Pertama, faktor pendapatan perkapita yang rendah berpengaruh terhadap peluang anak usia 7-18 tahun untuk bersekolah dan menyebabkan rumah tangga tersebut rentan miskin. Kedua, peluang bersekolah anak usia 7-18 tahun yang bertempat tinggal di perdesaan lebih rendah daripada di perkotaan, dan ketiga, faktor pendidikan ibu berpengaruh positif terhadap partisipasi anak usia 7-18 tahun untuk bersekolah.

Tabel 1. Jumlah Penduduk yang Buta Huruf di Indonesia 2015-2019

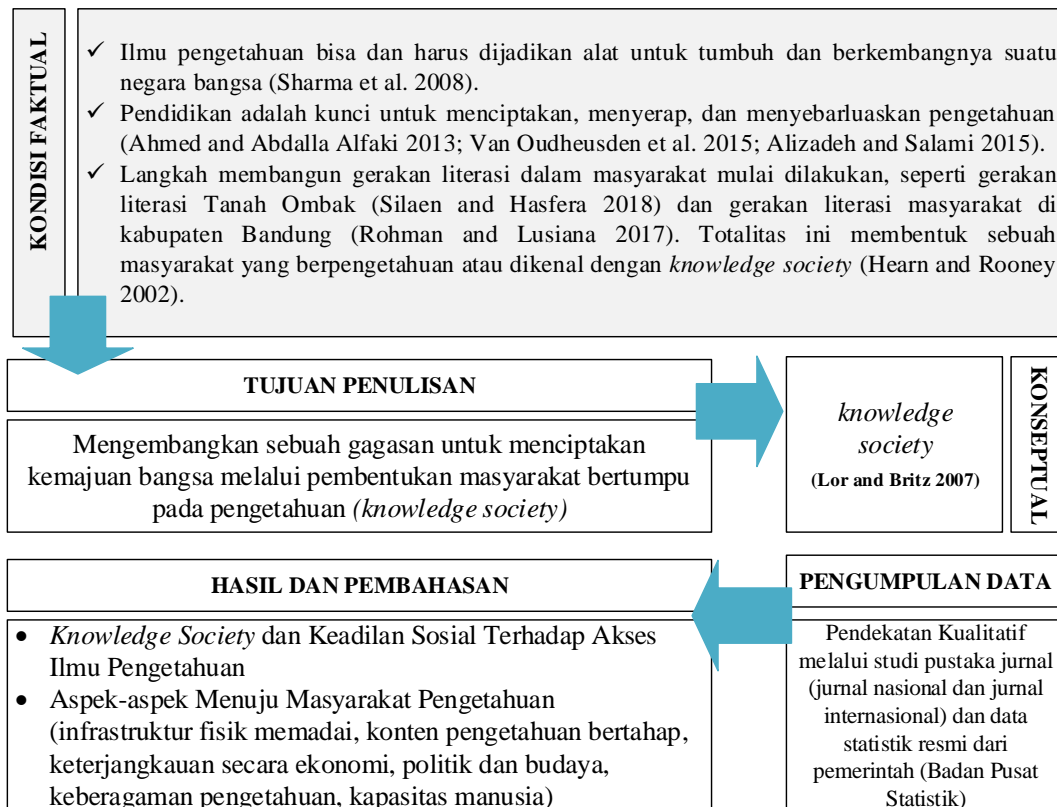
BUTA HURUF	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Buta Huruf 10 th +	4,27	4,19	4,08	3,93	3,70
Angka Buta Huruf 15 th +	4,78	4,62	4,50	4,34	4,10
Angka Buta Huruf 15-44 th	1,10	1,00	0,94	0,86	0,76
Angka Buta Huruf 45 th +	11,89	11,47	11,08	10,60	9,92

Sumber: BPS 2020

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sampai dengan tahun 2019 angka buta aksara penduduk usia 15 tahun keatas terdapat 4,10 persen. Selain itu juga, Angka Partisipasi Sekolah (APS) – rasio penduduk yang bersekolah menurut kelompok usia sekolah – untuk penduduk usia 7-12 tahun sudah mencapai 99,17 persen, namun APS penduduk usia 13-15 tahun baru mencapai 95,43 persen, dan APS penduduk usia 16-18 tahun baru mencapai 71,92 persen. Data tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat sekitar 4,57 persen anak usia 13-15 tahun, dan sekitar 28,08 persen anak usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah baik karena belum/tidak pernah sekolah maupun karena putus sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi (BPS 2020). Situasi yang digambarkan di atas menyiratkan bahwa pengetahuan secara formal masih belum didapatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini sejalan dengan hasil riset terdahulu yang mengemukakan bahwa buta aksara masih terjadi di lingkungan masyarakat, walaupun upaya pemerintah melalui sejumlah program terus dilakukan (Anisykurillah 2020). Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan ini berusaha mengembangkan sebuah gagasan untuk menciptakan kemajuan bangsa melalui pembentukan masyarakat bertumpu pada pengetahuan (*knowledge society*).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penulisan ini adalah deskriptif kualitatif melalui studi pustaka. Semua data yang digunakan dan menjadi bahan analisis bersumber dari data sekunder, seperti jurnal (jurnal nasional dan jurnal internasional) dan data BPS yang berhubungan dengan topik penulisan. Secara diagramis kerangka penulisan dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Penulisan "Penegakan Keadilan Sosial terhadap Akses Ilmu Pengetahuan Menuju *Knowledge Society*"

HASIL DAN PEMBAHASAN

Knowledge Society dan Keadilan Sosial terhadap Akses Ilmu Pengetahuan

Berbagai macam definisi mengenai *knowledge society* di antaranya adalah masyarakat yang di dalamnya terdapat aliran pengetahuan dengan tingkat intensitas yang tinggi (Ciurcina 2004). Suatu masyarakat berbasis pengetahuan mengacu pada tipe masyarakat yang diperlukan untuk bersaing dan berhasil dalam dinamika ekonomi dan politik yang berubah dari dunia modern. Hal ini mengacu pada masyarakat yang berpendidikan, dan karena itu bergantung pada pengetahuan warga negara mereka untuk mendorong inovasi, kewirausahaan dan dinamika ekonomi yang masyarakat (Krings 2006). *Knowledge society* adalah pembentukan masyarakat didasarkan pada pemahaman bahwa pengetahuan sebagai komponen utama usaha pengembangan manusia (Bindé dkk. 2005). Sebuah masyarakat yang bertumpu pada pengetahuan menciptakan, membagi dan menggunakan pengetahuan bagi kemakmuran dan kesejahteraan mereka.

Masyarakat Indonesia akan baik jika keadilan sosial terhadap akses pengetahuan dapat ditegakkan. Keadilan sosial terhadap akses pengetahuan merupakan hal yang sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia. Berbagai ketimpangan dan rendahnya kemampuan masyarakat Indonesia dalam mendapatkan ilmu pengetahuan merupakan salah satu bukti ketidakadilan dalam mendapatkan akses pengetahuan. Teori Utilitarianisme oleh John Stuart Mill (Lebacqz 1986) mengemukakan penjelasan mengenai keadilan dilihat dari sudut yang berbeda, yakni terjadinya ketidakadilan. Ada enam hal yang disebut ketidakadilan, yakni (1) Perampasan sesuatu yang telah menjadi hak hukumnya, (2) Perampasan sesuatu yang telah menjadi hak moral, (3) Masyarakat tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, (4) Melunturkan kepercayaan masyarakat, (5) Menjadi sangat khusus dan, (6) Memperlakukan orang tidak merata.

Berdasarkan enam hal tersebut, terlihat bahwa pengetahuan belum dapat diakses merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa tingkat buta huruf di beberapa wilayah Indonesia masih cukup tinggi, dan masih ada daerah dengan tingkat buta hurufnya di atas 45% dari total penduduk di wilayah tersebut. Padahal mengetahui huruf adalah kunci untuk mendapatkan pengetahuan. Selain itu, biaya pendidikan yang semakin hari semakin meningkat, menghilangkan kesempatan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia yang tergolong miskin untuk mendapatkan pengetahuan secara formal. Ketidakadilan juga terjadi karena sumber-sumber pengetahuan seperti buku, majalah, koran dan media lainnya, tidak terjangkau oleh mereka dikarenakan harganya yang cukup relatif mahal. Ketidakadilan juga terjadi ketimpangan infrastruktur pendidikan formal di daerah desa dan kota yang sangat tajam. Infrastruktur pendidikan di beberapa wilayah Indonesia masih sangat minim, bahkan dalam kondisi yang mengenaskan. Ketersediaan tenaga pendidik juga sangat sedikit bagi daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh transportasi. Ketidakadilan yang lain adalah pengetahuan masyarakat lokal atau kearifan lokal yang sering dilupakan dan ditinggalkan karena tidak dianggap sebagai pengetahuan yang baku.

Keadilan sosial terhadap ilmu pengetahuan akan tercapai dengan terciptanya keseimbangan dalam akses pengetahuan serta ketersediaan sumber-sumber pengetahuan. Selain itu juga, mudahnya masyarakat mendapatkan pengetahuan serta memahami dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tingkat buta huruf yang semakin berkurang menunjukkan bahwa masyarakat telah mendapatkan pendidikan yang memadai.

Aspek-aspek Menuju Masyarakat Pengetahuan

Untuk mendapatkan keadilan sosial bagi masyarakat pengetahuan, terdapat lima aspek yang harus diciptakan dan dibentuk (Lor, Peter Johan, dan Johannes Jacobus Britz 2007). Pertama, infrastruktur fisik memadai. Aspek ini merupakan salah satu aspek penting dalam membentuk *knowledge society*. Ketersediaan infrastruktur fisik dalam menyalurkan pengetahuan sangat dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi suatu bangsa. Kemampuan negara yang baik menghasilkan infrastruktur yang baik. Infrastruktur fisik pada pendidikan formal perlu dikembangkan dengan memperbaiki sekolah-sekolah dasar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu juga perlu membentuk dan memperbaiki infrastruktur informal seperti balai-balai pertemuan warga dimasing-masing daerah terkecil. Aliran pengetahuan tercipta, jika infrastruktur yang ada berjalan dengan baik, selain itu perlu digalakkan kembali koran masuk desa, dan juga pengadaan perpustakaan di setiap desa atau kelurahan di seluruh pelosok Indonesia.

Kedua, konten pengetahuan bertahap. Aspek dalam konten pengetahuan sangatlah penting. Membentuk masyarakat yang bertumpu pengetahuan harus memperhatikan konten pengetahuan yang diberikan. Pengadaan konten pengetahuan secara bertahap membantu memudahkan pemahaman dan terjadinya aliran pengetahuan. Pada permulaan, konten pengetahuan yang disediakan kepada masyarakat harus disesuaikan dengan kemampuannya, mulai tahap dasar hingga tahap lanjutan. Pengadaan konten pengetahuan secara bertahap membantu tumbuhnya ilmu pengetahuan di masyarakat Indonesia. Di samping itu, konten pengetahuan yang ada di Indonesia sangat minim, permasalahan ini terkait dengan penyimpanan pengetahuan. Masyarakat Indonesia terbiasa dengan pengetahuan yang diedarkan secara lisan daripada tulisan. Pengetahuan yang dialirkan secara lisan mudah hilang dan tidak akan tersimpan selamanya. Untuk mewujudkan masyarakat pengetahuan, budaya penyimpanan pengetahuan melalui tulisan sangat diperlukan sehingga dapat menjaga konten pengetahuan lokal.

Ketiga, keterjangkauan secara ekonomi, politik dan budaya. Menciptakan suatu masyarakat pengetahuan adalah bagaimana pengetahuan tersebut dapat dijangkau oleh masyarakat. Keterjangkauan disini dapat berarti kemudahan masyarakat dalam memperoleh

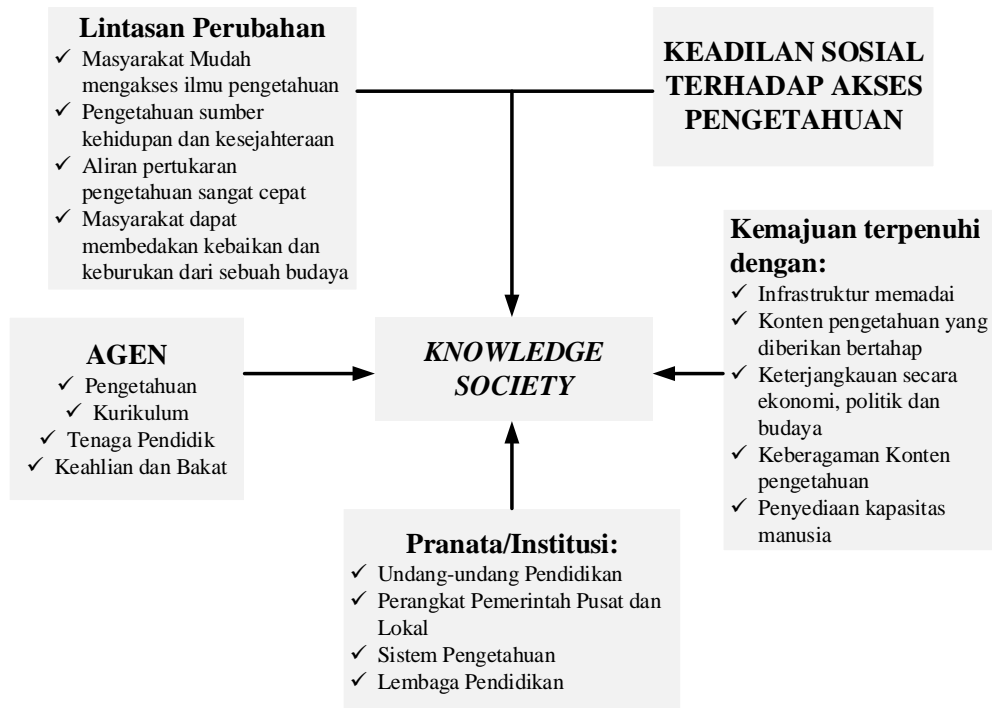
pengetahuan tanpa harus mengeluarkan biaya lebih. Pendidikan murah dengan kualitas yang memadai merupakan salah satu syarat bagi terciptanya masyarakat pengetahuan. Peran pemerintah sangat penting dalam memberikan akses bagi masyarakat Indonesia untuk mendapatkan keadilan sosial dalam mendapatkan pendidikan dan pengetahuan. Secara nasional, pemerintah telah melakukan beberapa upaya dalam rangka menciptakan pemerataan pendidikan di Indonesia. Diantaranya dengan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, selain itu juga pemerintah telah membebaskan biaya bagi sekolah dasar (SD), membuat program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), hingga bagi Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) mendapatkan bantuan bagi siswa-siswi yang kurang mampu. Pemerataan dan perluasan pendidikan atau biasa disebut perluasan kesempatan belajar merupakan salah satu sasaran dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan tersebut tidak boleh dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial, agama, maupun letak geografis (Hakim 2016).

Keterjangkauan dalam segi budaya adalah pengetahuan dapat diakses dari berbagai lapisan masyarakat yang budayanya berbeda. Salah satu kendala dalam akses pengetahuan adalah bahasa. Beberapa pengetahuan yang berkembang di dunia pada saat ini menggunakan bahasa asing atau bahasa inggris. Untuk menciptakan keterjangkauan tersebut perlu menerjemahkan pengetahuan-pengetahuan tersebut kedalam Bahasa Indonesia secara komprehensif dan selain itu juga pengetahuan yang didapat dari luar dapat diterjemahkan kedalam bahasa lokal daerah setempat. Jika masyarakat telah paham dengan pengetahuan yang didapat secara lambat laun mereka akan mengerti dan memahami pengetahuan yang diperoleh dari luar. Setelah masyarakat dapat memahami dan mengerti, kemudian pengetahuan mengenai bahasa asing dapat mulai dikenalkan.

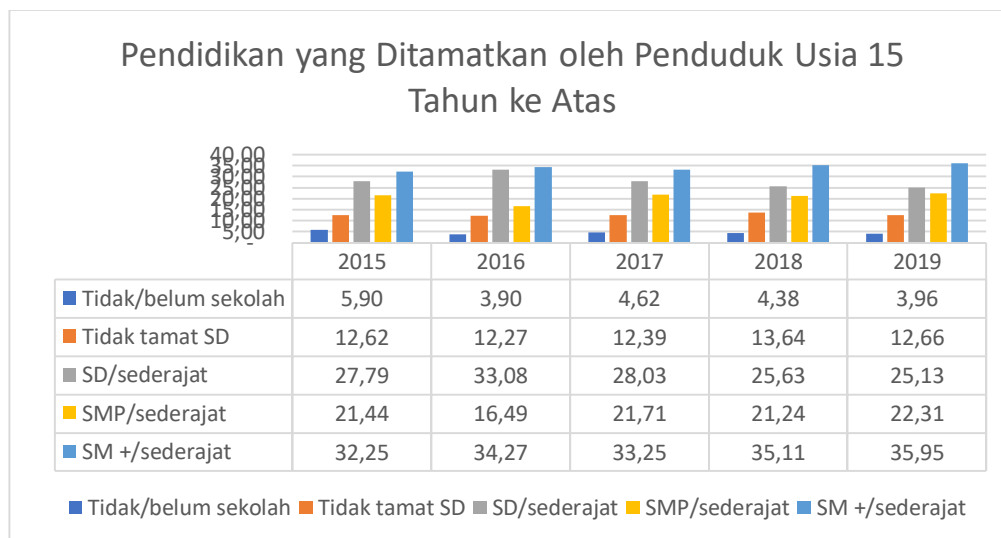
Keempat, keberagaman pengetahuan. Keberagaman sangat diperlukan dalam sebuah masyarakat yang bertumpu pada pengetahuan. Keberagaman akan semakin memperkaya pengetahuan. Keberagaman ini dapat diwujudkan melalui memperbanyak pengetahuan yang disebarkan pada masyarakat. Pengetahuan yang disebarkan tidak hanya satu saja, namun banyak. Akan tetapi perlu pengawasan ketat dalam hal ini sehingga tidak terjadi penyalahgunaan dalam kegiatannya, karena beragamnya pengetahuan yang ada. Pada saat ini keberagaman pengetahuan hanya dimiliki sebagian orang yang mendapatkan akses pengetahuan. Beberapa masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi yang rendah tidak mempunyai pilihan-pilihan untuk mendapatkan pengetahuan. Menciptakan keberagaman dapat dengan membuka akses perpustakaan dan pelatihan bagi warga yang kurang mampu secara gratis.

Kelima, kapasitas manusia. Aspek terakhir yang perlu menjadi hal penting dalam menghasilkan masyarakat yang bertumpu pada pengetahuan adalah kebutuhan terhadap kemampuan manusia yang berkeahlian tinggi. Masyarakat yang berbasis pengetahuan melihat kapasitas manusia ini dari tersedianya tenaga ahli berupa tenaga pendidik dan peneliti. Tenaga pendidik yang ada di Indonesia tidak merata, masih terdapat sekolah di beberapa wilayah Indonesia yang kekurangan tenaga pendidik. Pengembangan kapasitas manusia ini juga tidak hanya dibatasi pada tenaga pada pendidikan formal saja, melainkan juga tenaga-tenaga profesional yang bekerja di berbagai sektor. Pengembangan kapasitas manusia tersedia bagi seluruh masyarakat baik perempuan dan golongan masyarakat minor. Terakhir adalah perlunya mengembangkan dan memperhatikan peneliti yang ada di dalamnya. Peneliti merupakan tiang tombak bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Keadilan juga perlu dirasakan oleh para peneliti. Perbaikan fasilitas penelitian menjadikan peneliti memiliki semangat dalam melaksanakan kerjanya.

Lima aspek di atas merupakan kriteria kemajuan untuk menciptakan masyarakat pengetahuan atau *knowledge society*. Dari rangkaian cerita di atas dapat digambarkan pemikiran dalam menciptakan masyarakat pengetahuan (Gambar 2). Upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan keadilan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu dapat dilihat dalam penurunan jumlah penduduk yang putus sekolah atau pun belum menikmati Pendidikan khususnya sekolah dasar mulai menurun sejak tahun 2015 sebagaimana terlihat pada gambar 3.



Gambar 2. Sebuah Gagasan Menuju Kemajuan



Sumber: BPS 2020

Gambar 3. Pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas

Salah satu dampak dari aspek-aspek yang dapat menuju masyarakat berpengetahuan di Indonesia, yakni akses pendidikan secara ekonomi dapat dilihat pada angka partisipasi sekolah penduduk Indonesia yang semakin meningkat (tabel 2).

Tabel 2. Jumlah Partisipasi Penduduk terhadap Pendidikan Formal di Indonesia

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Partisipasi Pendidikan Formal					
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 th	98,57	98,98	99,08	99,11	99,17
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 th	94,25	94,79	94,98	95,23	95,43
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 th	70,26	70,68	71,20	71,82	71,92
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 19-24 th	22,77	23,80	24,67	24,29	23,28
Partisipasi Pendidikan Kasar (APK)					
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	109,94	109,20	108,43	108,48	107,36
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	90,63	89,98	90,00	91,23	90,20
Angka Partisipasi Kasar (APK) SM/MA	77,39	80,44	82,25	80,11	79,94
Angka Partisipasi Kasar (APK) PT	20,89	23,44	25,00	25,12	25,13
Partisipasi Pendidikan Murni (APM)					
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	96,20	96,71	97,14	97,48	97,58
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	77,45	77,89	78,30	78,75	79,35
Angka Partisipasi Murni (APM) SM/MA	59,46	59,85	60,19	60,53	60,70
Angka Partisipasi Murni (APM) PT	17,34	17,91	18,62	18,59	18,85
Partisipasi Pendidikan Formal Dan Nonformal (**)					
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 th	99,09	99,09	99,14	99,22	99,24
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 th	94,72	94,88	95,08	95,36	95,51
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 th	70,61	70,83	71,42	71,99	72,36
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 19-24 th	22,95	23,93	24,77	27,92	25,21
Partisipasi Pendidikan Kasar (APK) Paket A					
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	110,50	109,31	108,50	108,61	107,46
Partisipasi Pendidikan Kasar (APK) Paket B					
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	91,17	90,12	90,23	91,52	90,57
Partisipasi Pendidikan Kasar (APK) Paket C					
Angka Partisipasi Kasar (APK) SM/MA/Paket C	78,02	80,89	82,84	80,68	83,98
Partisipasi Pendidikan Murni (APM) Paket A					
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	96,70	96,82	97,19	97,58	97,64
Partisipasi Pendidikan Murni (APM) Paket B					
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	77,82	77,95	78,40	78,84	79,40
Partisipasi Pendidikan Murni (APM) Paket C					
Angka Partisipasi Murni (APM) SM/MA/Paket C	59,71	59,95	60,37	60,67	60,84

Sumber: BPS 2020

Keterangan:

** Pendidikan non formal yang dicakup adalah paket A setara SD/MI, paket B setara SMP/MTs dan paket C setara SM/SMK/MA

Tabel 3. Angka Partisipasi Sekolah berdasarkan Provinsi Tahun 2017-2019

Provinsi	13-15			16-18			19-24		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017	2019	2018	2017
Aceh	98,52	98,49	98,09	83,26	82,92	82,15	32,54	32,59	34,28
Sumatera Utara	96,89	96,75	96,60	77,67	77,41	76,76	25,75	25,31	26,80
Sumatera Barat	96,23	96,37	96,29	83,63	83,08	82,86	35,66	33,87	35,45
Riau	95,37	94,95	94,73	77,29	77,27	76,52	28,16	27,19	27,28
Jambi	96,42	96,14	95,89	71,97	71,94	71,54	23,32	22,16	24,12
Sumatera Selatan	94,51	94,41	94,01	70,29	69,65	69,05	18,07	17,15	19,17
Bengkulu	97,18	97,36	97,20	79,39	79,33	79,07	30,71	29,15	29,90
Lampung	94,89	95,00	94,76	71,05	70,83	70,03	20,69	20,60	20,96
Kep. Bangka Belitung	92,87	92,70	92,41	67,79	67,11	66,99	17,01	15,99	14,99
Kep. Riau	98,50	99,20	99,08	84,04	83,78	82,80	18,98	18,24	19,13
Dki Jakarta	98,33	97,77	97,64	72,01	71,81	71,50	24,52	24,41	24,60
Jawa Barat	94,18	94,15	93,77	67,29	67,17	66,62	22,71	21,96	21,50
Jawa Tengah	96,11	95,79	95,48	69,65	69,02	68,48	22,41	21,92	22,13
Di Yogyakarta	99,56	99,72	99,63	88,97	88,39	87,61	51,85	51,69	51,33
Jawa Timur	97,43	97,02	96,77	72,74	72,18	71,51	24,80	22,86	23,34
Banten	95,79	95,79	95,67	68,72	68,35	67,77	21,43	20,42	21,33
Bali	97,72	97,92	97,72	82,83	82,35	82,16	27,86	27,24	26,56
Nusa Tenggara Barat	97,92	97,72	97,69	77,51	76,89	76,61	25,59	25,74	28,52
Nusa Tenggara Timur	95,11	94,95	94,76	75,36	74,83	74,65	29,27	28,27	27,80
Kalimantan Barat	92,85	92,84	92,51	68,37	68,35	67,53	23,69	23,86	25,80
Kalimantan Tengah	94,09	93,87	93,37	66,95	66,95	66,62	23,98	24,27	24,15
Kalimantan Selatan	92,83	92,43	92,33	69,19	68,66	68,30	24,34	23,82	23,53
Kalimantan Timur	98,83	98,89	98,79	81,81	81,55	81,32	29,89	29,84	30,04
Kalimantan Utara	96,50	96,38	96,04	76,06	75,62	75,12	23,11	23,04	20,72
Sulawesi Utara	95,18	95,00	94,91	74,04	73,67	73,04	22,55	21,45	24,22
Sulawesi Tengah	93,01	92,74	92,41	75,73	75,05	74,87	27,39	27,15	26,31
Sulawesi Selatan	93,22	93,13	93,09	70,85	70,81	70,60	34,44	33,72	32,16
Sulawesi Tenggara	94,78	94,29	94,08	74,03	73,47	72,94	31,27	30,01	30,03
Gorontalo	91,64	91,38	91,23	71,44	70,75	69,86	30,97	30,58	29,21
Sulawesi Barat	89,92	89,95	89,88	69,31	68,69	68,03	23,64	24,10	23,49
Maluku	97,29	97,05	96,86	79,65	79,12	79,08	38,58	37,82	38,20
Maluku Utara	96,97	97,47	97,24	76,41	76,36	76,06	31,23	31,36	32,10
Papua Barat	96,58	97,08	96,92	81,49	80,81	80,60	31,48	30,84	31,92
Papua	80,13	80,00	79,09	63,50	63,48	63,35	22,91	23,37	24,57

Sumber: BPS, 2020

Namun demikian, pemerataan dan perluasan pendidikan masih belum menjangkau seluruh masyarakat, sebagaimana gambar di atas jumlah penduduk Indonesia masih belum terbebas dari kesempatan untuk memperoleh Pendidikan Formal. Pertumbuhan jumlah

penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang menamatkan sekolah SD, SMP dan SMA yang sederajat masih sangat rendah. Selain itu berdasarkan geografis angka partisipasi sekolah masyarakat Indonesia masih belum ada yang menunjukkan 100 persen penduduk dapat menikmati Pendidikan Formal sebagaimana terlihat pada tabel 3.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Penegakan keadilan sosial terhadap akses ilmu pengetahuan akan dapat terwujud jika gagasan menuju kemajuan dengan aspek-aspek dalam pembangunan masyarakat pengetahuan dapat diimplementasikan oleh Pemerintah. Meningkatnya jumlah partisipasi masyarakat dalam pendidikan baik formal dan non formal, akses pengetahuan yang mudah, budaya pengetahuan yang menjadi keseharian masyarakat Indonesia dan ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas serta mudahnya masyarakat untuk mengembangkan kapasitasnya adalah kunci keberhasilan penegakan keadilan sosial terhadap ilmu pengetahuan. Dengan hal tersebut, pembangunan masyarakat pengetahuan di Indonesia dapat dicapai dengan mudah.

Rekomendasi

Gagasan menuju kemajuan dapat mulai diimplementasikan dengan lima aspek masyarakat berbasis pengetahuan, yaitu dengan mulai membangun dan mengembangkan infrastruktur memadai bagi penguatan ilmu pengetahuan, seperti pembangunan fasilitas pendidikan dasar dan perpustakaan/taman baca berbasis komunitas, pengembangan dan distribusi konten pengetahuan yang diberikan bertahap, kemudahan akses dan keterjangkauan secara ekonomi, politik dan budaya, pengembangan dan distribusi keberagaman konten pengetahuan, dan pengembangan kapasitas manusia dengan pemberian akses beasiswa bagi setiap lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Allam, and Ibrahim M. Abdalla Alfaki. 2013. "Transforming the United Arab Emirates into a Knowledge-based Economy." *World Journal of Science, Technology and Sustainable Development* 10 (2) 84–102. doi:<https://doi.org/10.1108/20425941311323109>.
- Alizadeh, Parisa, and Reza Salami,. 2015. "Assessment of Knowledge Economy a Comparative Study between Iran and Turkey and Lessons for Policy-Making." *Journal of Science and Technology Policy Management* 6 (1): 37–55.
- Amalia, Rizki Nur, and Heppy Hyma Puspytasari, . 2018. "Analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Terhadap Akses Orang Miskin Pada Pendidikan." *Perspektif Hukum* 18 (2) 315–327.
- Anisykurillah, Rosyidatuzzahro. 2020. "Evaluasi Pembangunan Pendidikan Keaksaraan (Studi Pada Program Pendidikan Non-Formal Di Kota Malang)." *Jurnal Kebijakan Pembangunan* 25–36.
- Bindé, Jérôme, UNESCO. Director-General, 1999-2009 (Matsuura, K.),. 2005. *Towards knowledge societies: UNESCO world report*. Book, Paris: the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization .
- BPS. 2020. *Statistik Indikator Pendidikan, 1994-2019*. Jakarta, Indonesia: Badan Pusat Statistik.

- Ciurcina, Marco. 2004. *Freedom and Control in the Knowledge Society*. Stanford California USA, 25 May. Diakses 03 16, 2020. https://docs.hipatia.net/fk/free_knowledge100505.pdf.
- Doriza, Shinta, Deniey A Purwanto, and Ernita Maulida,. 2012. “Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Disparitas Akses Pendidikan Dasar Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia* 13 (1) 31–46.
- Fitriyanti, Siska, Herry A Pradana, and M Arief Anwar,. 2019. “Strategi Percepatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Kabupaten Hulu Sungai Utara.” *Jurnal Kebijakan Pembangunan* 171–181.
- Hakim, Lukman. 2016. “Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Rakyat Sesuai Dengan Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.” *Jurnal EduTech* 53-64.
- Hearn, Greg, and David Rooney,. 2002. “The Future Role of Government in Knowledge-Based Economies.” *Foresight* 23–33. doi:<https://doi.org/10.1108/14636680210453461>.
- Huggins, Robert, and Hiro Izushi,. 2008. “Benchmarking the Knowledge Competitiveness of the Globe’s High-Performing Regions: A Review of the World Knowledge Competitiveness Index.” *Competitiveness Review* 18 ((1–2)): 70–86. doi:<https://doi.org/10.1108/10595420810>.
- Krings, Bettina,. 2006. “The Sociological Perspective on the Knowledge-Based Society: Assumptions, Facts and Visions.” *Enterprise and Work Innovation Studies* 9–20.
- Kulikov, Sergey B.,. 2016. “Russian Way to the Knowledge-Based Society.” *Foresight* 379–390. doi:<https://doi.org/10.1108/FS-02-2016-0005>.
- Lebacqz, Karen. 1986. *Six theories of justice: Perspectives from philosophical and theological ethics*. Minneapolis MN: Augsburg Books.
- Limilia, Putri, and Nindi Aristi. . 2019. “Literasi Media Dan Digital Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Sistematis.” *Jurnal Komunikatif* 8 (2) 205–222.
- Lor, Peter Johan, and Johannes Jacobus Britz. 2007. “Is a Knowledge Society Possible without Freedom of Access to Information?” *Journal of Information Science* 33 ((4)): 387–397. doi:<https://doi.org/10.1177/0165551506075327>.
- Michel Callon and Geof Bowker. 1994. “Is Science a Public Good? Fifth Mullins Lecture, Virginia Polytechnic Institute, 23 March 1993.” *Science, Technology, & Human Values* (Sage Publications, Inc.) 19 (4): 395-424. <https://www.jstor.org/stable/689955> .
- Mohamed, Mirghani S, Kevin J. O’Sullivan, dan Vincent Ribièrè. 2008. “A Paradigm Shift in the Arab Region Knowledge Evolution.” *Journal of Knowledge Management* (5) 12 (5) 107–200. doi:<https://doi.org/10.1108/13673270810902975>.
- Mohamed, Mirghani S., Kevin J. O’Sullivan, and Vincent Ribièrè,. 2008. “A Paradigm Shift in the Arab Region Knowledge Evolution.” *Journal of Knowledge Management* (5) 12 (5): 107–200. doi:<https://doi.org/10.1108/13673270810902975>.
- Mukti, Fajar Dwi. 2018. “Literasi Sains Dan Pendidikan Karakter Di Era Globalisasi.” *Jurnal Abdau : Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah* 106–127.

- Nurohman, Aris. 2014. "Signifikansi Literasi Informasi (Information Literacy) Dalam Dunia Pendidikan Di Era Global." *Jurnal KependidikanII (1)* 1–25.
- Oudheusden, Michiel Van, Nathan Charlier, Benedikt Rosskamp, and Pierre Delvenne,. 2015. "Broadening, Deepening, and Governing Innovation: Flemish Technology Assessment in Historical and Socio-Political Perspective." *Research Policy* 44 (10) 1877–1886. doi:<https://doi.org/10.1016/j.respol.2015.06.010>.
- Perdana, Novrian Satria,. 2015. "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Aksesibilitas Memperoleh Pendidikan Untuk Anak-Anak Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 279–298.
- Rohman, Asep Saeful, dan Elnovani Lusiana,. 2017. "Gerakan Literasi Masyarakat Kabupaten Bandung." *Shaut Al-Maktabah* 25–40.
- Sharma, Ravi S., Elaine W.J. Ng, Mathias Dharmawirya, and Chu Keong Lee,. 2008. "Beyond the Digital Divide: A Conceptual Framework for Analyzing Knowledge Societies." *Journal of Knowledge Management* 12 ((5)): 151–164. doi:<https://doi.org/10.1108/13673270810903000>.
- Silaen, Yoseva, and Dian Hasfera,. 2018. "Membangun Generasi Literat Masyarakat Pesisir Pantai: Gerakan Literasi 'Tanah Ombak.'" *Shaut Al-Maktabah* 103–118. doi:<https://doi.org/10.15548/shaut.v10i2.77>.
- Yanuarto. 2010. "Kebijakan Pembangunan Pendidikan Dalam Upaya Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan." *Cakrawala: Jurnal Pendidikan* 4 (7) 1-13.
- Yigitcanlar, Tan, and Muna Sarimin,. 2015. "Multimedia Super Corridor, Malaysia: Knowledge-Based Urban Development Lessons from an Emerging Economy." *Vine* 45 (1): 126–147. doi:<https://doi.org/10.1108/VINE-06-2014-0041>.